

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis terhadap hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Implementasi standar akuntansi pemerintahan di Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dilihat dari empat aspek :

- Komunikasi

Berdasarkan hasil total skor rata-rata diperoleh 3.32 yang mengindikasikan bahwa aspek komunikasi berada pada kondisi sangat baik. Namun untuk indikator distribusi Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM SE. No.A.KU.01.03.21 Tentang Pengiriman Dokumen Pelaksanaan APBN Departemen Hukum dan HAM Tahun 2006 dapat disimpulkan bahwa tidak semua pegawai pelaksana SAK di unit pelaksana teknis menerima surat edaran tersebut, sehingga menjadi penghambat penggabungan laporan keuangan ditingkat departemen.

- Sumber daya

Berdasarkan hasil total skor rata-rata diperoleh 3.16 yang mengindikasikan bahwa aspek sumber daya berada pada kondisi sangat baik. Namun dalam indikator sumber daya manusia yang menangani aplikasi sistem akuntansi keuangan (SAK) bahwa tidak semua UPT mempunyai jumlah dan kualitas pegawai pelaksana SAK yang memadai untuk menunjang pelaksanaan SAI.

- Sikap/disposisi

Berdasarkan hasil total skor rata-rata diperoleh 3.10 yang mengindikasikan bahwa aspek sikap/disposisi berada pada kondisi baik. Namun untuk indikator Satker telah mengirimkan ADK setiap bulannya dengan tepat waktu dan Satker selalu mentaati ketentuan yang diatur dalam pelaksanaan SAK belum berjalan sesuai dengan harapan.

- Struktur birokrasi

Berdasarkan hasil total skor rata-rata diperoleh 3.04 yang mengindikasikan bahwa aspek struktur birokrasi berada pada kondisi baik. Namun Di unit pelaksana teknis belum terdapat pembagian tugas yang jelas diantara pegawai pelaksana SAK sehingga menghambat proses penyusunan laporan keuangan ditingkat Satker (UAKPA).

2. Strategi penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan di Sekretariat Jenderal adalah diadakannya pelatihan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal mengingat selalu berubahnya kode anggaran, setiap bulannya bagian akuntansi dan pelaporan menghubungi jajaran dibawahnya untuk dapat mengirimkan ADK, SPM, SP2D dan SSBP. Setiap semester membuat surat teguran bagi Satker, dengan demikian diharapkan akan tercipta pertanggungjawaban laporan keuangan yang sesuai dengan SAP melalui SAI, serta diadakannya monitoring kedaerah yang tidak secara rutin mengirimkan arsip data komputernya.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang ingin peneliti sampaikan bagi pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya

Bagi pelaksana/pegawai di kantor wilayah/UPT yang menangani sistem akuntansi keuangan agar dapat mengikutsertakan setiap pelatihan yang diadakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, mengingat selalu berubahnya aplikasi SAK serta Biro Keuangan membuat pedoman penyusunan laporan keuangan dengan bisa mudah dimengerti.

Komunikasi

Dep. Hukum dan HAM membuat peraturan pelaporan keuangan sendiri selain surat edaran serta peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2006 untuk kelancaran proses penyusunan laporan keuangan

Sikap/disposisi

Dibentuknya sistem pengendalian intern untuk pengawasan (monitoring) terhadap pelaksanaan pengumpulan ADK serta proses penyusunan laporan keuangan

Struktur Birokrasi

Adanya pembagian tugas yang jelas di

2. Secara akademis, disarankan kepada peneliti selanjutnya, agar dapat melakukan penelitian lebih mendalam berkaitan dengan implementasi SAP melalui SAI.

